PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Bupati Jombang tanggal 22 November 2023 nomor 050/844/415.01/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Sekretariat DPRD dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Sekretariat DPRD, yang akhirnya mampu mewujudkan tema pembangunan Kabupaten Jombang.

Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon saran, bimbingan, dan masukkan dari semua pihak utamanya dari Pemerintah Kabupaten Jombang maupun Dinas Instansi terkait guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang.

Jombang, 4 Juli 2024
SEKRETARIS DPRD

Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196807091989031007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Jombang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan sebagaiamana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Renja merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berkenaan;
- Merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD.

Mengingat arti penting dari Renja, maka penyusunannya diupayakan dapat mengakomodasi proses pendekatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja SKPD yang dalam hal ini Rencana Kerja Sekretariat DPRD, penyusunan tersebut harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten mencakup 5 (lima) pendekatan, yakni:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas–Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya.
5. Pendekatan Bottom–Up (Bawah–Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Bottom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Penyusunan Renja OPD Sekretariat DPRD Tahun 2025 mengacu pada penyusunan RKPD Tahun 2025 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dengan tema/arah pembangunan daerah tahun 2025 yang harus dapat diwujudkan adalah “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ekonomi Melalui Hilirisasi Agrobisnis” serta sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

1.2. **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;

19. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
21. Surat Bupati Jombang Tanggal 22 November 2023 Nomor: 050/844/415.01/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Derangkat Daerah (Renja PD) Tahun Angaran 2025.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025 guna mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan.
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4. **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pelaku pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan di era globalisasi dimana informasi terus berkembang maka pada tahun 2025 diarahkan pada pencapaian Misi yang ke-1 yakni: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan digitalisasi Layanan Publik .

Dalam rangka mendukung Misi tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD pada tahun 2025 melaksanakan 2 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 13 Kegiatan dan 42 sub kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	**Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota**	• Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

		• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
		• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	• Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
		• Administrasi Umum Perangkat Daerah	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan • Fasilitasi Kunjungan Tamu • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya • Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan • Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya • Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
		• Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	• Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD • Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD • Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
		• Layanan Administrasi DPRD	• Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2.	**Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	• Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	• Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah • Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah • Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan • Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
		• Pembahasan Kebijakan Anggaran	• Pembahasan APBD • Pembahasan APBD Perubahan

		• Peningkatan Kapasitas DPRD	• Pendalaman Tugas DPRD • Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli • Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi • Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat • Publikasi dan Dokumentasi Dewan
		• Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	• Kunjungan Kerja dalam Daerah • Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD • Pelaksanaan Reses
		• Fasilitasi Tugas DPRD	• Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD • Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan secara umum mengalami peningkatan kinerja. Capaian kinerja kegiatan pada tahun 2023 mencapai 99% dengan penyerapan anggaran sebesar 96%.

Capaian Kinerja tahun 2023 Sekretariat DPRD:

1. Sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD dengan target yang ditetapkan 76,50 realisasi 70,78 (tercapai 92,52%)
2. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD dengan target yang ditetapkan 7,39 realisasi 7,00 (tercapai 94,72%)

Rata-rata capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2023 adalah 93,62% dengan predikat sangat memuaskan.

Anggaran Sekretariat DPRD tahun 2023 adalah Rp. 75.208.954.381,00 terealisasi Rp. 71.292.323.343,00 (tercapai

94,79%).

Berikut disajikan secara terperinci pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2023 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi sekaligus kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut, yakni:

A. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

Semua program/kegiatan/Sub Kegiatan ada 1 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan indikator Dokumen Perda yang dihasilkan adalah 3 Dokumen dan realisasinya 2 (tercapai 66,67%) dan tetapi dengan penyerapan anggaran 87,97%.

B. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 94,01%.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja tercapai 100%, dan penyerapan anggaran 78,25%
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 80%
    - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 0%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 70,16%
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kinerja tercapai 90% dan penyerapan anggaran 69%.
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tercapai 100% dengan penyerapan anggaran 84%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah kinerja tercapai

100% dan penyerapan anggaran 88,19%.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tercapai 100% dan penyerapan anggaran 88,19%

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,04%
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 90%.
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97%.
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 75%, serapan anggaran tidak maksimal karena ada fluktuasi harga dan kebutuhan berdasarkan relalisasi kebutuhan.
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 44% hal ini karena adanya perbedaan harga di lapangan dengan SSH dan kebutuhan real di kantor sulit untuk di prediksi karena mengikuti dinamika kegiatan di masing-masing urusan.
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99%.
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%.
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 75%, serapan anggaran tidak maksimal karena kebutuhan berdasarkan relalisasi Jumlah kunjungan tamu ke Sekretariat DPRD.
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,01%
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan

anggaran 99,01%

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 84,46%.
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%.
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 90%
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 83%.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 72,72%.
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 95%.
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kinerja tercapai 92% dan penyerapan anggaran 59% hal ini karena kebutuhan real di kantor sulit untuk di prediksi karena mengikuti pemeliharaan kendaraan operasional yang ada di Sekretariat DPRD.
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 94%.
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 81%.
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,93%
    - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99%.
    - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 94%.
    - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD kinerja tercapai

40% dan penyerapan anggaran 63%.

9. Layanan Administrasi DPRD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 77,32%
    - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 77,32%

b. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Kinerja tercapai 98,43% dan penyerapan anggaran 97,32%.

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD kinerja tercapai 66,67% dan penyerapan anggaran 87,97%.
    - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 90%
    - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 64%
    - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 64%
    - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 94%
2. Peningkatan Kapasitas DPRD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 70,79%
    - Pendalaman Tugas DPRD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 67%
    - Publikasi dan Dokumentasi Dewan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 82%
    - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 37% hal ini disebabkan kebutuhan kelompok pakar disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan DPRD.
    - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 96%
    - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 89%
3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 85,43%

- Kunjungan Kerja dalam Daerah kinerja tercapai 40% dan penyerapan anggaran 0% Hal ini karena disesuaikan dengan kegiatan anggota DPRD
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 32% Hal ini disesuaikan dengan fluktuasi harga yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran
- Pelaksanaan Reses kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 95%

4. Fasilitasi Tugas DPRD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD kinerja tercapai 84% dan penyerapan anggaran 100%
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99%

D. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan:

1. Dukungan dan komitmen Sekretaris DPRD serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program di Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD yang kompeten di bidangnya
3. Seluruh stakeholder Sekretariat DPRD memahami tupoksi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen PK, sehingga kinerja dapat tercapai maksimal.
4. Adanya monitoring kinerja setiap tribulan dari atasan dapat mengidentifikasi kendala dan masalah dalam pencapaian target kinerja.

E. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD. Dari program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

Sekretariat DPRD sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah:

- ✓ Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD tahun 2018-2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Sekretariat DPRD pada umumnya,
- ✓ Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target/ melebihi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Sekretariat DPRD.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah:

1. Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu.
2. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD Tahun 2024.
3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi serta memberikan pendampingan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada OPD terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di Sekretariat DPRD.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome / Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) / 2022					Target Program & Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Sekretariat DPRD Tahun (n-2) / 2022		Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) / 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program & Kegiatan s/d Tahun (n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur**	**100%**	**N/A**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
4	02	01	2	01		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	N/A	100	Persen	100	Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
4	02	01	2	01	01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	N/A	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
4	02	01	2	01	07	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	N/A	5	Laporan	5	Laporan	100	5 laporan	5 Laporan	100
4	02	01	2	02		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	N/A	100	Persen	100	Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
4	02	01	2	02	01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	N/A	31	Orang/Bulan	31	Orang/Bulan	100	31 Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	100
4	02	01	2	02	03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	N/A	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
						Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16 Laporan	N/A	16	Laporan	16	Laporan	100	16 Laporan	16 Laporan	100

4	02	01	2	05		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100%	N/A	100	Persen	100	Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
4	02	01	2	05	02	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Orang	N/A	30	Orang	30	Orang	100	30 Orang	30 Orang	100
4	02	01	2	05	11	Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	N/A	50	Orang	50	Orang	100	50 Orang	50 Orang	100
4	02	01	2	06		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	N/A	100	Persen	100	Persen	100	100 persen	10 Persen	100
4	02	01	2	06	01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	N/A	20	Paket	20	Paket	100	20 Paket	20 Paket	100
4	02	01	2	06	02	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	21 Paket	N/A	21	Paket	21	Paket	100	21 Paket	21 Paket	100
4	02	01	2	06	03	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	17 Paket	N/A	17	Paket	17	Paket	100	17 Paket	17 Paket	100
4	02	01	2	06	04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	N/A	1	Paket	1	Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
4	02	01	2	06	05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	N/A	10	Paket	10	Paket	100	10 Paket	10 Paket	100
4	02	01	2	06	06	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	N/A	10	Dokumen	10	Dokumen	100	10 Dokumen	10 Dokumen	100
4	02	01	2	06	08	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	N/A	12	Laporan	12	Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
4	02	01	2	06	09	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	N/A	12	Laporan	12	Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
4	02	01	2	07		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	N/A	100	Persen	100	Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
4	02	01	2	07	01	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	N/A	10	Unit	10	Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
4	02	01	2	07	09	Sub Kegiatan: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	N/A	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
4	02	01	2	07	10	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	N/A	4	Unit	4	Unit	100	4 Unit	4 Unit	100

4	02	01	2	08		Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	N/A	100	Persen	100	Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
4	02	01	2	08	02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	N/A	48	Laporan	48	Laporan	100	48 Laporan	48 Laporan	100
4	02	01	2	08	04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	N/A	60	Laporan	60	Laporan	100	60 Laporan	60 Laporan	100
4	02	01	2	09		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	N/A	100	Persen	100	Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
4	02	01	2	09	01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	N/A	5	Unit	5	Unit	100	5 Unit	5 Unit	100
4	02	01	2	09	02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	N/A	39	Unit	39	Unit	100	39 Unit	39 Unit	100
4	02	01	2	09	09	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	1 Unit	N/A	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
4	02	01	2	09	10	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	112 Unit	N/A	112	Unit	112	Unit	100	112 Unit	112 Unit	100
4	02	01	2	15		Kegiatan: Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan	100%	N/A	100	Persen	100	Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
4	02	01	2	15	01	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	N/A	50	Orang/Bulan	50	Orang/Bulan	100	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	100
4	02	01	2	15	02	Sub Kegiatan: Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	N/A	3	Paket	3	Paket	100	3 Paket	3 Paket	100
4	02	01	2	15	03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	N/A	50	Orang	50	Orang	100	50 Orang	50 Orang	100
4	02	01	2	16		Kegiatan: Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan	100%	N/A	100	Persen	100	Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
4	02	01	2	16	03	Sub Kegiatan: Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	N/A	12	Laporan	12	Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
4	**02**	**02**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP)**	**87,31**	**N/A**	**87,31**	**Indeks**	**87,31**	**Indeks**	**100**	**87, 31 Indeks**	**87, 31 Indeks**	**100**
							INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	**3,3**	**N/A**	**3,3**	**Indeks**	**3,3**	**Indeks**	**100**	**3,3 Indeks**	**3,3 Indeks**	**100**

4	02	02	2	01		Kegiatan: Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Perda yang dihasilkan	3 Dokumen	N/A	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
4	02	02	2	01	01	Sub Kegiatan: Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	N/A	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4	02	02	2	01	02	Sub Kegiatan: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	N/A	7	Dokumen	7	Dokumen	100	7 Dokumen	7 Dokumen	100
4	02	02	2	01	03	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	20 Dokumen	N/A	20	Dokumen	20	Dokumen	100	20 Dokumen	20 Dokumen	100
4	02	02	2	01	04	Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	N/A	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
4	02	02	2	02		Kegiatan: Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	2 Dokumen	N/A	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4	02	02	2	02	03	Sub Kegiatan: Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	N/A	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	02	02	2	02	04	Sub Kegiatan: Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	N/A	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	02	02	2	04		Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	N/A	50	Orang	50	Orang	100	50 Orang	50 Orang	100
4	02	02	2	04	02	Sub Kegiatan: Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	N/A	6	Dokumen	6	Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
4	02	02	2	04	04	Sub Kegiatan: Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 Orang	N/A	4	Orang	4	Orang	100	4 Orang	4 Orang	100
4	02	02	2	04	05	Sub Kegiatan: Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	N/A	8	Orang	8	Orang	100	8 Orang	8 Orang	100
4	02	02	2	04	06	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10 Dokumen	N/A	10	Dokumen	10	Dokumen	100	10 Dokumen	10 Dokumen	100
4	02	02	2	04	08	Sub Kegiatan: Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	342 Dokumen	N/A	342	Dokumen	342	Dokumen	100	342 Dokumen	342 Dokumen	100
4	02	02	2	05		Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masya rakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 Kegiatan	N/A	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
4	02	02	2	05	01	Sub Kegiatan: Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	N/A	5	Laporan	5	Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100
4	02	02	2	05	02	Sub Kegiatan: Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	N/A	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
4	02	02	2	05	03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	N/A	150	Dokumen	150	Dokumen	100	150 Dokumen	150 Dokumen	100
4	02	02	2	08		Kegiatan: Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD yang difasilitasi	2 Tugas	N/A	2	Tugas	2	Tugas	100	2 Tugas	2 Tugas	100

4	02	02	2	08	01	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	350 Dokumen	N/A	350	Dokumen	350	Dokumen	100	350 Dokumen	350 Dokumen	100
4	02	02	2	08	04	Sub Kegiatan: Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dokumen	N/A	50	Dokumen	50	Dokumen	100	50 Dokumen	50 Dokumen	100

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat DPRD merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan DPRD, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan DPRD dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD menyelenggarakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program

   Sampai dengan periode tribulan IV tahun 2023 Sekretariat DPRD menyusun 3 dokumen perencanaan yaitu dokumen renja 2023, Perubahan Renja 2023 dan Perubahan Renstra 2024-2026. Pengendalian dan Evaluasi Program sebanyak 5 dokumen yaitu dokumen LKJiP 2023, monitoring capaian kinerja dan anggaran tribulan 1,2,3 dan 4
2. Capaian Peningkatan Pelayanan

   Dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD yaitu terlaksananya berbagai kegiatan DPRD baik yang berhungan langsung dengan masyarakat, baik berupa serap aspirasi ataupun kegiatan pendalaman tugas DPRD yang berfungsi meningkatkan wawasan DPRD sehingga dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau indikator-indikator lainnya yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Sekretariat DPRD menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Evaluasi capaian kinerja pelayanan disajikan dengan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Jombang

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Evaluasi AKIP	Sangat baik	Sangat baik	Memuaskan	Memuaskan	Baik	Sangat baik	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	
		BB	BB	A	A	B	BB	A	A	A	
2	Nilai Indeks kualitas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD	Baik	Berkualitas	Berkualitas	Berkualitas	Baik	Berkualitas	Berkualitas	Berkualitas	Berkualitas	
		78.75	-	-	87,31	81.93	-	-	-	87,31	
		7.15	7.384	7.50	7,4	-	7.80	7.04	7.04	7,4	

2.3. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

   Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah:
   a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam PRPJMD Kab. Jombang Tahun 2018-2023
   b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan
   c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Sekretariat DPRD belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah keempat yang tertuang dalam dokumen P-RKPD Kab. Jombang tahun 2023 yakni mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi proses layanan

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

   Tantangan :
   a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan;
   b. Jaringan Internet yang masih terkadang crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
   c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
   d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

Peluang :

a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional;
e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Sekretariat DPRD terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

4. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
   a. Perencanaan Pembangunan
      - Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangkab, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.
      - Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perubahan rencana strategis tahun 2018-2023 sehingga diperlukan output yang lebih aspiratif.

- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Keamanan dan Ketertiban

Setiap tahun OPD Sekretariat DPRD dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Sekretariat DPRD dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tribulan II, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Sekretariat DPRD melalui 1 (empat) Program rutin dan 4 program Kecamatan

Sejauh ini tingkat kinerja Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dengan baik sesuai perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana hal ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan daerah dan kiranya perlu untuk menjadi perhatian pada tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 yang merupakan bagian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada arah kebijakan tahap ke-4 periodesasi 2005-2025 dari dokumen RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan melihat kondisi yang berkembang di masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan Program Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Hal tersebut berarti aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean goverment dan

good governance.

Sekretariat DPRD mempunyai peran penting dalam proses pembangunan mendukung keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi dan politik di Sekretariat DPRD membutuhkan sinergitas antar seluruh SKPD, disebabkan terbatasnya anggaran dengan kebutuhan pembangunan yang cukup banyak. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kebijaksanaan dalam melihat secara komprehensif demi peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Sekretariat DPRD.

Secara keseluruhan hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Jombang

Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Kab. Jombang**	**PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR**	**100%**	**48.933.693.836**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kab. Jombang**	**PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR**	**100%**	**48.933.693.836**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Jombang**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang sesuai**	**100%**	**7.822.500**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Jombang**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang sesuai**	**100%**	**7.822.500**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	2.025.000	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	2.025.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*5 Laporan*	5.857.500	*Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*5 Laporan*	5.857.500	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Kab. Jombang***	***Persentase Laporan Keuangan yang tersusun sesuai aturan***	***100%***	**4.436.013.888**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Kab. Jombang***	***Persentase Laporan Keuangan yang tersusun sesuai aturan***	***100%***	**4.436.013.888**	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	*Kab. Jombang*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*28 Orang/Bulan*	4.128.705.888	*Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*28 Orang/Bulan*	4.128.705.888	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*12 Dokumen*	307.308.000	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*12 Dokumen*	307.308.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Kab. Jombang***	***Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD***	***100%***	**502.100.000**	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Kab. Jombang***	***Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD***	***100%***	**502.100.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	*1 Paket*	15.600.000	*Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	*1 Paket*	15.600.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*50 orang*	486.500.000	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*50 orang*	486.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Kab. Jombang***	***Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah***	***100%***	**3.411.144.750**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kab. Jombang***	***Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah***	***100%***	**3.411.144.750**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia*	*20 Paket*	34.918.350	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia*	*20 Paket*	34.918.350	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang Terfasilitasi*	*21 Paket*	327.039.200	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang Terfasilitasi*	*21 Paket*	327.039.200	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Terfasilitasi*	*17 Paket*	21.927.300	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Terfasilitasi*	*17 Paket*	21.927.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	122.250.000	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	122.250.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terfasilitasi*	*10 Paket*	303.170.400	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terfasilitasi*	*10 Paket*	303.170.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*10 Dokumen*	75.264.000	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*10 Dokumen*	75.264.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	149.575.000	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	149.575.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	2.377.000.500	*Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	2.377.000.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Kab. Jombang***	***Persentase Realiasasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur***	***100%***	**2.133.989.060**	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Kab. Jombang***	***Persentase Realiasasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur***	***100%***	**2.133.989.060**	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kab. Jombang*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	1.730.579.000	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	1.730.579.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kab. Jombang*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*9 Unit*	403.410.060	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*9 Unit*	403.410.060	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Kab. Jombang***	***Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	**1.761.715.536**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kab. Jombang***	***Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	**1.761.715.536**	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*36 Laporan*	509.070.000	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*36 Laporan*	509.070.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*60 Laporan*	1.252.645.536	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*60 Laporan*	1.252.645.536	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Kab. Jombang***	***Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik***	***100%***	**1.270.112.510**	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kab. Jombang***	***Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik***	***100%***	**1.270.112.510**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kab. Jombang*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*112 Unit*	160.022.600	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*112 Unit*	160.022.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*5 Unit*	282.510.000	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*5 Unit*	282.510.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*39 Unit*	615.200.000	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*39 Unit*	615.200.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kab. Jombang*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*1 Unit*	212.379.910	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*1 Unit*	212.379.910	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	***Kab. Jombang***	***Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan***	***100%***	**34.837.703.092**	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	***Kab. Jombang***	***Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan***	***100%***	**34.837.703.092**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD*	*50 Orang/Bulan*	34.202.924.892	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD*	*50 Orang/Bulan*	34.202.924.892	

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*3 paket*	553.150.000	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*3 paket*	553.150.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*50 orang*	81.628.200	*Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*50 orang*	81.628.200	
	Layanan Administrasi DPRD	***Kab.Jombang***	***Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan***	***100%***	**573.032.500**	***Layanan Administrasi DPRD***	***Kab.Jombang***	***Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan***	***100%***	**573.032.500**	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*12 Laporan*	573.032.500	*Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*12 Laporan*	573.032.500	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	***Kab. Jombang***	***1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	***87.92***	**54.510.619.500**	***PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD***	***Kab. Jombang***	***1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	***87.92***	**54.510.619.500**	
			2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	***3,39***				***2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)***	***3,39***		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	***Kab. Jombang***	**Jumlah Dokumen Perda yang dihasilkan**	**3 Dokumen**	**509.500.000**	***Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD***	***Kab. Jombang***	**Jumlah Dokumen Perda yang dihasilkan**	**3 Dokumen**	**509.500.000**	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	2 Dokumen	10.300.000	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	2 Dokumen	10.300.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	7 Dokumen	115.500.000	*Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	7 Dokumen	115.500.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	20 Dokumen	59.700.000	*Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	20 Dokumen	59.700.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik*	3 Dokumen	324.000.000	*Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik*	3 Dokumen	324.000.000	

	Pembahasan Kebijakan Anggaran	***Kab. Jombang***	***Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran***	***2 Dokumen***	**156.000.000**	***Pembahasan Kebijakan Anggaran***	***Kab. Jombang***	***Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran***	***2 Dokumen***	**156.000.000**	
	Pembahasan APBD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	*1 Dokumen*	96.000.000	*Pembahasan APBD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	*1 Dokumen*	96.000.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil APBD Perubahan*	*1 Dokumen*	60.000.000	*Pembahasan APBD Perubahan*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil APBD Perubahan*	*1 Dokumen*	60.000.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	***Kab. Jombang***	***Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas***	***50 Orang***	**5.233.913.000**	***Peningkatan Kapasitas DPRD***	***Kab. Jombang***	***Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas***	***50 Orang***	**5.233.913.000**	
	Pendalaman Tugas DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*6 Dokumen*	3.496.038.000	*Pendalaman Tugas DPRD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*6 Dokumen*	3.496.038.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	*342 Dokumen*	800.000.000	*Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	*342 Dokumen*	800.000.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Kab. Jombang*	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*4 Orang*	552.000.000	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*4 Orang*	552.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Kab. Jombang*	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*8 Orang*	336.000.000	*Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*8 Orang*	336.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*10 Dokumen*	49.875.000	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*10 Dokumen*	49.875.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	***Kab. Jombang***	***Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	***3 Kegiatan***	**1.745.968.000**	***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	***Kab. Jombang***	***Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	***3 Kegiatan***	**1.745.968.000**	

	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	*5 Laporan*	77.298.000	*Kunjungan Kerja dalam Daerah*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	*5 Laporan*	77.298.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun*	*2 Dokumen*	93.670.000	*Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun*	*2 Dokumen*	93.670.000	
	Pelaksanaan Reses	*Kab. Jombang*	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*150 Dokumen*	1.575.000.000	*Pelaksanaan Reses*	*Kab. Jombang*	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*150 Dokumen*	1.575.000.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	***Kab. Jombang***	***Jumlah Tugas DPRD yang Terfasilitasi***	***2 Tugas***	**46.865.238.500**	***Fasilitasi Tugas DPRD***	***Kab. Jombang***	***Jumlah Tugas DPRD yang Terfasilitasi***	***2 Tugas***	**46.865.238.500**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*12 Dokumen*	40.345.470.500	*Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*12 Dokumen*	40.345.470.500	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*12 Dokumen*	6.519.769.000	*Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*12 Dokumen*	6.519.769.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD Kabupaten.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Sekretariat DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari proses penyelarasan beberapa isu penting yang diekspose dalam dokumen ini dengan usulan program dan kegiatan, telah dituangkan beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang berkaitan dengan :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif, maka akan diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam penyusunan Renstra.
b. Pelaksanaan program yang berkaitan pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Jombang.
c. Kegiatan serap aspirasi masyarakat (reses) yang bertujuan menyerap kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah yang dituangkan dalam usulan pokok-pokok pikiran dari DPRD.

Secara umum, usulan program dan kegiatan telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Sekretariat DPRD sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan pada Forum SKPD dan berpedoman pada RKPD Kab. Jombang Tahun 2024, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

No	Rancangan Awal RKPD				
	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Kab. Jombang**	**PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR**	**100%**	**48.933.693.836**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Jombang**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang sesuai**	**100%**	**7.822.500**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.025.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.857.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Jombang**	**Persentase Laporan Keuangan yang tersusun sesuai aturan**	**100%**	**4.436.013.888**
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	4.128.705.888
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	307.308.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Jombang**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD**	**100%**	**502.100.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	15.600.000

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*50 orang*	486.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Kab. Jombang***	***Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah***	***100%***	**3.411.144.750**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia*	*20 Paket*	34.918.350
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang Terfasilitasi*	*21 Paket*	327.039.200
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Terfasilitasi*	*17 Paket*	21.927.300
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	122.250.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terfasilitasi*	*10 Paket*	303.170.400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*10 Dokumen*	75.264.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	149.575.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	2.377.000.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	***Kab. Jombang***	***Persentase Realiasasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur***	***100%***	**2.133.989.060**
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kab. Jombang*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	1.730.579.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kab. Jombang*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*9 Unit*	403.410.060
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	***Kab. Jombang***	***Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	**1.761.715.536**

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*36 Laporan*	509.070.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*60 Laporan*	1.252.645.536
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	***Kab. Jombang***	***Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik***	***100%***	**1.270.112.510**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kab. Jombang*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*112 Unit*	160.022.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*5 Unit*	282.510.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*39 Unit*	615.200.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kab. Jombang*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*1 Unit*	212.379.910
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	***Kab. Jombang***	***Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan***	***100%***	**34.837.703.092**
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD*	*50 Orang/Bulan*	34.202.924.892
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*3 paket*	553.150.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*50 orang*	81.628.200
	Layanan Administrasi DPRD	***Kab.Jombang***	***Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan***	***100%***	**573.032.500**
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*12 Laporan*	573.032.500
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	***Kab. Jombang***	***1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	***87.92***	**54.510.619.500**
			2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	***3,39***	

	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	***Kab. Jombang***	**Jumlah Dokumen Perda yang dihasilkan**	**3 Dokumen**	**509.500.000**
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	2 Dokumen	10.300.000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	7 Dokumen	115.500.000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	20 Dokumen	59.700.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik*	3 Dokumen	324.000.000
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	***Kab. Jombang***	***Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran***	***2 Dokumen***	**156.000.000**
	Pembahasan APBD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	*1 Dokumen*	96.000.000
	Pembahasan APBD Perubahan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil APBD Perubahan*	*1 Dokumen*	60.000.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	***Kab. Jombang***	***Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas***	***50 Orang***	**5.233.913.000**
	Pendalaman Tugas DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*6 Dokumen*	3.496.038.000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	*342 Dokumen*	800.000.000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Kab. Jombang*	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*4 Orang*	552.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Kab. Jombang*	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*8 Orang*	336.000.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan*	*10 Dokumen*	49.875.000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	***Kab. Jombang***	***Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi***	***3 Kegiatan***	**1.745.968.000**

	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	*5 Laporan*	77.298.000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun*	*2 Dokumen*	93.670.000
	Pelaksanaan Reses	*Kab. Jombang*	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*150 Dokumen*	1.575.000.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	***Kab. Jombang***	***Jumlah Tugas DPRD yang Terfasilitasi***	***2 Tugas***	**46.865.238.500**
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*12 Dokumen*	40.345.470.500
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*12 Dokumen*	6.519.769.000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana RPJPD, RPD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1 **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana kerja Pemerintah (RKP) 2024 bertema , "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusi" yang dijabarkan ke dalam 7 prioritas pembangunan nasional (PN):

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Rencana kerja Daerah harus sejalan dengan rencana kerja pemerintah oleh karena itu tema/ arah pembangunan daerah tahun 2024 adalah "Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul" yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat, Keamanan dan Ketentraman Umum
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk Membangun SDM yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Inovatif serta Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025 dimana merupakan bagian Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Pada tahun 2025 terdapat 3 (tiga) prioritas pembangunan, dengan tema/arah pembangunan daerah pada tahun 2025 yaitu "**Hilirisasi Agrobisnis**".

Guna mendukung Arah Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja OPD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, maka tujuan yang ingin dicapai dari Renja tahun 2025 adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Sekretariat DPRD dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran OPD Sekretariat DPRD tahun 2025 adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja dan Meningkatnya

Kualitas Layanan Publik, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi AKIP
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

a. **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan**

- Pencapaian Tujuan Daerah

  Perumusan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD diarahkan untuk mencapai Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik dengan sasaran RPD adalah "Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi" yang selaras dengan tujuan OPD yaitu "Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi"

- Pencapaian SPM

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan

berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Sekretariat DPRD diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Pengarustamaan Gender

  Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2025 telah menempatkan program/kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Pengurustamaan Gender sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada 10 Kegiatan yang sudah melaksanakan/mengakomodasi kepentingan Pengarustamaan Gender dari 14 Kegiatan atau 71.42%.

b. **Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan**

- **Jumlah Program dan Kegiatan**

  Rencana Kerja Sekretariat DPRDTahun 2025 mencakup 2 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan yaitu :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

   - **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
     a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
     a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - **Administrasi Kepegawaian**
     a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
     b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   - **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
     a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
     b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
     d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
     f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
     g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
     h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  b. Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
- **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**
  a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
  d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
  a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
  b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
  c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- **Layanan Administrasi DPRD**
  a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

2. **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**
   - **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**
     a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
     b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

- **Pembahasan Kebijakan Anggaran**
  a. Pembahasan APBD
  b. Pembahasan APBD Perubahan
- **Peningkatan Kapasitas DPRD**
  a. Pendalaman Tugas DPRD
  b. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
  c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
  d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
  e. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
- **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
  a. Kunjungan Kerja dalam Daerah
  b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
  c. Pelaksanaan Reses
- **Fasilitasi Tugas DPRD**
  a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
  b. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

- **Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan**

  Dari 2 (dua) program dan 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 untuk dilaksanakan di Sekretariat DPRD sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Sekretariat DPRD.
- **Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya**

  Sumber pendanaan seluruh program dan kegiatan pada Renja 2025 berasal dari APBD Kab. Jombang dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 103.559.540.377,00

c. **Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.**

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA

maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi OPD dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 mengacu pada penyusunan RKPD Tahun 2025 yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Pada tahun 2025 terdapat 3 (tiga) prioritas pembangunan kabupaten Jombang adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat, Keamanan dan Ketentraman Umum
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk Membangun SDM yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Inovatif serta Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah

Tema/arah pembangunan daerah tahun 2024 yang harus dapat diwujudkan adalah "Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul" serta sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Sekretariat DPRD. Renja sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.1. **Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.**

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJPD Tahun 2005-2025.

1.2. **Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut**:

a. Sekretariat DPRD berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025.
b. Sekretariat DPRD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025.
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

1.3. **Rencana Tindak Lanjut.**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Sekretariat DPRD juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Sekretariat DPRD ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Bupati Terpilih serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan

pembangunan Kabupaten Jombang. Selanjutnya perlu pula ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait, sehingga makin memantapkan apa yang telah dicapai sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Dokumen Rencana Kerja SKPD Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan, dengan harapan terwujudlah suatu kegiatan pembangunan yang berkesinambungan.

Jombang, 4 Juli 2024
SEKRETARIS DPRD

Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196807091989031007